



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALMAN PARLUHUTAN PAKPAHAN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 447938

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.850.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 380 m2/309 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000
2. Tanah Seluas 160 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.650.000.000
3. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 357.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, HONDA HR-V RU185 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
3. MOBIL, TOYOTA NEW CAMRY 2.4 V AT/ SEDAN Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 98.000.000
4. MOTOR, HONDA A1F02N37M1 AJT/ SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
5. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 20.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 8.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.215.500.000



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.215.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.